

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A . Latar belakang**

Pendidikan sampai dengan saat ini dianggap sebagai sumber utama dalam pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan ini akan dianggap bernilai:

”... jika memiliki sikap, perilaku, wawasan kemampuan, keahlian , serta keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau lapangan kerja dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan. Nilai-nilai SDM tersebut dapat dikembangkan melalui pendidikan persekolahan baik pada jenjang pendidikan dasar menengah, maupun pendidikan tinggi “ ( Suryadi, A, 1999 : 58 ) .

Nilai yang didapat melalui pendidikan tidak semata-mata yang berhubungan dengan aspek pengetahuan saja, tetapi berhubungan dengan ,sikap, keterampilan baik yang berhubungan dengan keilmuan tersebut ataupun keterampilan yang berhubungan dengan bekal hidupnya di masyarakat. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pengembangan tersebut harus dikelola melalui konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang ada pada manajemen. Hal ini berarti bahwa manajemen pendidikan merupakan aplikasi prinsip-prinsip, konsep-konsep dan teori manajemen dalam aktifitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

Dalam organisasi pendidikan termasuk dalam pengelolaan satuan pendidikan diperlukan manajemen efektif yang akan mampu mengembangkan potensi peserta didik, sehingga memiliki pengetahuan, sikap , keterampilan dan nilai yang mengakar pada karakter bangsa dan bermutu . Hal ini berarti :” Salah satu strategi yang menentukan mutu pengembangan SDM di sekolah untuk

kepentingan bangsa di masa depan adalah, peningkatan kontribusi manajemen pendidikan yang berorientasi mutu ( *quality oriented* ) “ (Syafarudin , 2002 :18 ) .

Atas dasar itulah maka pendidikan harus selalu diarahkan pada peningkatan mutu secara terus menerus.

Dalam mengelola dan menata lembaga pendidikan dihubungkan dengan administrasi pendidikan terdapat tiga fungsi utama : “ perencanaan , pelaksanaan dan pengawasan yang menyangkut tiga bidang garapan utama yaitu : Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Belajar ( SB ) dan Sumber Fasilitas dan Dana ( SFD )” ( Engkoswara, 1999 :26 ). Bahwa banyak faktor yang mempengaruhi suatu lembaga pendidikan dalam mencapai tujuannya, faktor yang besar pengaruhnya untuk menjamin keberhasilan adalah yang berhubungan dengan sumber daya manusia dalam manajemen pendidikan.

Manajemen pendidikan merupakan keterpaduan beberapa fungsi, dimana setiap fungsi memiliki kekhususan dalam efektivitasnya untuk mencapai keberhasilan. Untuk mencapai produktivitas diperlukan keterpaduan antara fungsi-fungsi utama dalam perilaku organisasi dibidang pendidikan , yaitu fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pada dasarnya perencanaan dan pelaksanaan merupakan satu kesatuan tindakan, pengawasan dan pengendalian diperlukan untuk melihat sejauh mana hasil tercapai.

Dalam aktivitas kehidupan kita sangat membutuhkan suatu pengendalian terhadap apa yang sedang dan telah dilakukan. Demikian pula dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan organisasi pendidikan perlu juga adanya pengendalian agar sesuatu itu sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Menurut Nana Saodih (

2006 :38 ): ” Bagian terpenting dari proses ini adalah pengendalian manajemen yang merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengarahkan orang, mesin dan fungsi-fungsi guna mencapai tujuan serta sasaran organisasi”. Sama halnya dalam proses pendidikan perlu adanya pengendalian dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Dengan demikian pengendalian suatu proses mengarahkan organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Disamping pelaksanaan pengendalian dalam kegiatan manajemen pendidikan diperlukan juga pengawasan. “ Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjaga agar kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai tujuan dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku “ ( Kep.Mendiknas No. 097 /U/2002 ).

Lebih jauh dalam Kep Mendiknas tersebut dikemukakan tentang Pengawasan fungsional dan Pengawasan Teknis. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan, Badan Pengawas Keuangan Pembangunan , Inspektorat Jendral, Badan Pengawas Propinsi dan Badan Pengawas Kabupaten/Kota. Pengawasan teknis adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah, penilik pada pendidikan luar sekolah, pembinaan pemuda dan olah raga, untuk memantau , menilai dan memberikan bimbingan terhadap penyelenggaraan pendidikan, pembinaan pemuda dan pembinaan olah raga. Pengawasan pendidikan secara teknis akan menyangkut keseluruhan bidang garapan dalam pengelolaan pendidikan.

Secara umum pengelolaan pendidikan dalam satuan pendidikan akan meliputi ; pengelolaan kurikulum, pengelolaan peserta didik, pengelolaan tenaga

kependidikan, pengelolaan sarana prasarana pendidikan, pengelolaan keuangan , pengelolaan kerjasama dengan masyarakat serta pengawasan pendidikan. Pada saat sekarang dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka pengelolaan satuan pendidikan harus memenuhi delapan standar Nasional yang meliputi : Standar isi, Standar proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pembiayaan dan Standar Penilaian. Untuk mengetahui pencapaian dari kedelapan standar tersebut perlu adanya pengawasan , untuk menjamin agar kegiatan-kegiatan tersebut terlaksana sesuai dengan rencana dan terus menerus berkembang .

Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat, dalam rangka pembinaan satuan pendidikan yang bersangkutan. “ Pengawasan lebih merupakan upaya untuk memberi bimbingan, binaan, dorongan dan pengayoman bagi satuan pendidikan yang bersangkutan, yang diharapkan terus menerus dapat meningkatkan mutu pendidikan maupun pelayanannya” (Penjelasan UU No.2 Tahun 1989 Pasal 52. ).

Sesuai dengan hal-hal tersebut di atas , bahwa kedudukan pengawasan pendidikan sebagai bagian dari siklus dan dinamika manajemen pendidikan, bahkan merupakan bagian dari fungsi pokok manajemen. Pengawasan harus menjadi pijakan untuk perbaikan, dasar untuk pembinaan dan pengembangan serta sasaran untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Seperti halnya dikemukakan oleh Ben M Harris ,( 1975 ; 2 ) ; “*Supervision is one of the essential functions for*

*the operation good schools* “. Hal ini sesuai pula dengan fungsi dari pengawasan pendidikan yang dikemukakan oleh Alfonso, ( 1981:121 )bahwa : “ *The function of supervision is to promote teacher professional growth to achieve a better – learning through better teaching* “. Atas dasar itu hasil kegiatan kepengawasan pendidikan harus bermanfaat dalam mengembangkan sekolah, salah satunya : “ harus dimanfaatkan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan mutu kinerja professional guru “ ( Sahertian , 2000 : 21 ).

Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya upaya meningkatkan kemampuan professional kepengawasan. Hal ini dirasakan penting karena pengawasan pendidikan merupakan bagian terpadu dalam keseluruhan penyelenggaraan pendidikan nasional, dari lingkup sekolah sampai lingkup makro. Pengawasan pendidikan akan menyangkut pengawasan dalam kerangka *audit control* dan pengawasan dalam kerangka *quality control* . Dalam kerangka *quality control* kepengawasan pada proses pendidikan di sekolah, menjadi tugas dari Pengawas sekolah untuk melaksanakan kegiatan kepengawasan. Hal ini sesuai dengan fungsi pengawasan seperti ditegaskan United Kingdom For HMSO (Hand Book , 1992 : 4 ) :

“ *The function of inspection set out in the Education (Schools) 1992* is to report on :

- *The quality of the education provide by school ;*
- *The educational standards achieved in those schools ;*
- *Whether the financial resources made available to those schools are managed efficiently ;*
- *The spiritual,moral, social and cultural development of pupils at those schools.”*

Pengawasan akan berhubungan dengan mutu yang telah ditetapkan di sekolah, standar hasil belajar siswa di sekolah termasuk manajemen sumber

keuangan secara efisien, dan perkembangan spiritual, sosial dan budaya siswa di sekolah itu. Sejak tanggal 1 Nopember 1996 berdasarkan SK. Men PAN .No.118/1996, jabatan pengawas sekolah berubah dari jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Konsekwensi perubahan jabatan tersebut menimbulkan perubahan esensi tugas dan kegiatan pengawas sekolah . Dimana tugas utama pengawas sekolah adalah , menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggung jawabnya . Ini semua ditujukan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan maupun pelayanannya, seperti ditegaskan dalam UU No.20 Tahun 2003 .

Peningkatan mutu pendidikan hendaknya menjadi tujuan dari semua tenaga kependidikan disetiap lembaga penyelenggara pendidikan dan pengelola pendidikan. Karena mutu pendidikan merupakan : “ suatu evaluasi terhadap proses pendidikan dengan harapan tinggi untuk dicapai dan mengembangkan bakat para pelanggan pendidikan dalam proses pendidikan. Mutu adalah hal yang esensial sebagai bagian dalam proses pendidikan “( Charles Hoy , 2000: 47 ). Dalam hubungannya dengan manajemen pendidikan, upaya meningkatkan mutu pendidikan harus menjadi program utama di sekolah.

Untuk itu pemerintah memandang perlu adanya Manajemen Peningkatan Mutu terpadu dalam pendidikan. Dalam aplikasinya istilah mutu terpadu terhadap pendidikan disebut juga “ *Total Quality Education* “. Dalam konteks aplikasi konsep manajemen mutu terpadu terhadap pendidikan, ditegaskan oleh Edward Sallis ( 1994 :14 ) :“*Total Quality Management is a philosophy improvement*

*which can provide any educational institution with a set of practical tools for meeting and exceeding present and future customers need, wants ,and expectations”.*

Definisi tersebut menjelaskan bahwa manajemen mutu terpadu menekankan pada dua konsep utama ; pertama sebagai suatu filosofi perbaikan terus menerus ( *continous improvement* ) , dan kedua berhubungan dengan alat-alat dan teknik yang digunakan untuk perbaikan mutu dalam tindakan manajemen untuk mencapai kebutuhan dan harapan pelanggan . Berarti manajemen mutu terpadu dalam pendidikan dapat saja disebut mengutamakan peserta didik atau untuk kepentingan program perbaikan sekolah, yang mungkin dilakukan secara lebih kreatif dan konstruktif. Hal ini berarti bahwa manajemen mutu terpadu pendidikan merupakan aplikasi konsep manajemen mutu, yang disesuaikan dengan sifat dasar sekolah sebagai organisasi jasa .Prosesnya sendiri melalui pengembangan pembelajaran bermutu , agar melahirkan lulusan yang sesuai dengan harapan orang tua , masyarakat dan pelanggan pendidikan lainnya.

Untuk mengetahui tingkat kepercayaan mutu itu perlu adanya pengawasan; ” Pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan” (Pasal 39 ayat (1) PP 19 Tahun 2005 ). Bagaimana peranan dari pengawas dalam konteks manajemen mutu terpadu dalam pendidikan. “

Pengawasan pendidikan diperlukan dalam peningkatan mutu pendidikan persekolahan . Tugas pengawas pendidikan , salah satunya adalah memberikan dorongan agar tenaga kependidikan , baik guru, kepala sekolah dan personil lainnya di sekolah , termotivasi untuk berkinerja “ (Amirudin Siahna,2006 : 4 ).

Kriteria-kriteria apa saja untuk dapat diangkat menjadi seorang pengawas sekolah sehingga nantinya betul-betul menjadi penjamin mutu dan panutan bagi guru , sehingga akan tepat apabila pengawas sekolah disebut sebagai “guru model “. Pengalaman dalam melaksanakan proses pembelajaran ketika bertugas sebagai guru, pengalaman pengelolaan atau manajerial sekolah ketika bertugas sebagai Kepala Sekolah , adalah bekal potensial yang dimiliki setiap pengawas melakukan kepengawasan di sekolah-sekolah. Kalau dibandingkan dengan pengawasan fungsional, apakah pengawasan teknis yang dilakukan oleh pengawas sekolah ada perbedaan dengan tugas pengawasan fungsional.

Sesuai dengan SK .Men PAN .No.118/1996 , kemudian diperbaharui dengan Keputusan Men PAN.No : 091/KEP/M.PAN/10/2001,Pasal 4 ayat ( 1 ), bahwa tugas pokok Pengawas sekolah adalah: Pengawas sekolah mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya.

Sesuai dengan penjelasan dari Keputusan Men PAN yang dimaksud dengan tugas pembinaan oleh pengawas sekolah maksudnya memberikan ,arahan, bimbingan, contoh dan saran , dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah.

Memberikan arahan, merupakan upaya pengawas sekolah agar guru dan tenaga kependidikan lainnya di sekolah, dalam menjalankan tugasnya terarah dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan . Memberikan bimbingan ,merupakan upaya pengawas sekolah agar guru dan tenaga kependidikan lainnya di sekolah mengetahui secara rinci kegiatan yang harus dilaksanakan dan cara melaksanakannya. Memberikan contoh, adalah upaya pengawas sekolah yang

dilaksanakan dengan cara yang bersangkutan bertindak sebagai guru yang melaksanakan proses belajar mengajar / memberi bimbingan, untuk materi tertentu di depan kelas atau diruang bimbingan konseling . Sedangkan tugas memberikan saran, merupakan upaya pengawas sekolah agar sesuatu proses pendidikan yang dilaksanakan disekolah lebih baik dari pada hasil yang dicapai sebelumnya, atau berupa saran kepada pimpinan untuk menindak lanjuti pembinaan yang tidak dapat dilaksanakan sendiri . Tugas menilai, menentukan tingkat derajat keberhasilan dari apa yang telah dilaksanakan oleh guru dan tenaga kependidikan lainnya setelah diadakan tugas pembinaan, sesuai dengan norma-norma penilaian yang berlaku.

Bagaimana keberadaan pelaksanaan tugas kepengawasan pendidikan diera otonomi daerah umumnya dan tugas pengawas sekolah pada khususnya ? Sebagai gambaran dari studi pendahuluan berupa analisis kondisi berkenaan dengan keberadaan pengawasan pendidikan dan kondisi faktual pengawas sekolah di lapangan saat ini adalah :

- a. Belum ada perencanaan program pengembangan kepengawasan mulai dari perencanaan pengadaan calon pengawas sekolah , pelatihan dan penilaian kinerja serta pengembangan karier Pengawas sekolah oleh Bagian Kepegawaian Daerah ( BKD) Pemda Kota Bekasi . Pengadaan Pengawas sekolah tidak lagi secara utuh menggunakan pedoman yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, baik Kep Men PAN maupun Kep Mendiknas, lebih dikaitkan dengan kepentingan kekuasaan di daerah.

- b. Pejabat struktural di Dinas Pendidikan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kepentingan politis, atau ada yang ingin memperpanjang usia masa kerja untuk pensiun dipindahkan menjadi pengawas sekolah tanpa melihat latar belakang yang bersangkutan apakah pernah menjadi guru atau pernah menjadi pengawas sebelumnya. Termasuk Kepala Sekolah yang kurang loyal terhadap Pemda, dengan tidak memperhitungkan usia, kualifikasi dan kompetensi sesuai aturan yang ada, diangkat menjadi Pengawas sekolah. Pengangkatan Pengawas sekolah tanpa seleksi dan tanpa pelatihan terlebih dahulu.
- c. Kebutuhan jumlah pengawas sekolah belum sebanding dengan jumlah sekolah yang harus menjadi sekolah binaan bagi setiap pengawas sekolah pada jenjang SMA dan SMK.
- d. Masukan dari lapangan khususnya dari guru-guru dan Kepala Sekolah, bahwa pelaksanaan tugas pengawas sekolah belum seluruhnya sesuai dengan tugas dan fungsi pengawas sekolah yaitu membina dan menilai, yang berhubungan dengan proses pembelajaran dan administrasi pengelolaan atau manajerial di sekolah, apalagi memberikan contoh dalam proses pembelajaran bagi guru-guru. Belum seluruh pengawas memiliki kompetensi pengawas yang dipersyaratkan sebagai seorang pengawas sekolah, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan pengawas sekolah masih lebih banyak berhubungan dengan kegiatan rutin kalender pendidikan di sekolah, seperti memantau PSB, Ulangan Umum dan Ujian akhir sekolah, pengenalan kurikulum dan administrasi

pembelajaran. Kegiatan pengawasan belum secara utuh mengarah pada supervisi akademik apalagi supervisi klinis. Kegiatan kepengawasan belum seluruhnya mencerminkan upaya-upaya dalam rangka penjaminan mutu pendidikan di sekolah. Kegiatan kepengawasan belum terarah kepada upaya peningkatan proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa, yang pada akhirnya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

- e. Masukan dari Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP ) Jawa Barat ,sesuai dengan tugas pokok LPMP adalah melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah , yang dalam pelaksanaannya dengan memberdayakan Pengawas Sekolah yang ada di tiap-tiap Kabupaten /Kota .Setiap tiga bulan sekali Pengawas sekolah diharuskan memberikan laporan kegiatan kepengawasannya ke LPMP . Hal ini menunjukkan betapa pentingnya tugas dan fungsi Pengawas sekolah dalam penjaminan mutu pendidikan.

#### **B. Perumusan dan pembatasan masalah**

Berdasarkan kondisi faktual dilapangan dihubungkan dengan fungsi pengawasan pendidikan dan khususnya tugas dan fungsi pengawas sekolah, belum terlaksana secara optimal. Pelaksanaan pengawasan pendidikan di sekolah oleh Pengawas Sekolah masih lebih berhubungan dengan administrasi guru dan administrasi sekolah yang ada di Tata usaha sekolah, dari pada ke proses pembelajaran , evaluasi dan analisis terhadap hasil belajar siswa dan kemampuan mengajar guru serta sumber daya lainnya.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranan pengawas sekolah sebagai penjaminan mutu pendidikan, dan dalam meningkatkan mutu pendidikan, perlu adanya usaha untuk memberdayakan pengawas sekolah dengan meningkatkan kinerja, dan kompetensinya. Apalagi sekarang ini dilingkungan sekolah dikembangkan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan pemerintah. Sekolah bertanggung jawab tentang mutu pendidikan sekolah masing-masing kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat pada umumnya. Sekolah akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan.

Dimana implementasi dari MPMBS salah satu tujuannya adalah : Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia,. Apalagi dalam hubungannya dengan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan pasal 91 ayat (1) PP No.19 Tahun 2005 : “Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan “. Dalam pelaksanaannya diperlukan keterlibatan pengawas sekolah, terutama dalam upaya peningkatan kualitas manajerial sekolah dan kualitas pembelajaran dalam upaya peningkatan mutu dan penjaminan mutu pendidikan tersebut. Oleh karena itu perlu adanya upaya pemberdayaan pengawas sekolah, sehingga mampu

melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana tuntutan kinerja tugas tersebut, sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan. Sebab seperti yang dikemukakan Amirudin Siahaan, ( 2006 : 11 ) tentang pemberdayaan :

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana tuntutan kinerja tugas tersebut . Pemberdayaan merupakan proses yang dapat dilakukan melalui berbagai upaya, misalnya pemberian wewenang penuh, peningkatan partisipasi , pemberian kepercayaan sehingga setiap orang atau kelompok dapat memahami apa yang dapat dikerjakannya yang pada akhirnya akan berimplikasi pada peningkatan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien” .

Sehingga diharapkan Pengawas sekolah itu betul-betul mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan tuntutan kinerja dan kompetensi yang dipersyaratkan. Pentingnya pemberdayaan itu sesuai dengan pengertian pemberdayaan menurut Kenneth E Fracaro (2006 ; 4 ) mengemukakan :” *Empowerment is assigning responsibilities, authority, and decision making power to employees and holding them accountable for results* “. Hal ini di dasarkan kepada fungsi pengawas sekolah itu bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang menjadi binaannya.

Sesuai dengan hal-hal tersebut di atas permasalahan dalam penelitian ini adalah : **“Bagaimana meningkatkan kompetensi pengawas sekolah untuk mengembangkan kepengawasan pendidikan di sekolah dalam penjaminan mutu pendidikan”**. Permasalahan tersebut memerlukan jawaban yang serius dan tuntas karena berhubungan sekali dengan upaya meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Menengah Atas ( SMA ) , dan bagian tidak terpisahkan dari manajemen pendidikan di Kota Bekasi .

Sesuai dengan permasalahan tersebut di atas ,penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- 1.Apakah Pengawas sekolah ,sudah memiliki dan melaksanakan Kompetensi yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan yang berlaku dan konsep supervisi dalam rangka penjaminan mutu pendidikan ?
- 2.Kompetensi-kompetensi pengawas sekolah apa saja yang harus diberdayakan dan ditingkatkan, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sebagai upaya dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di sekolah?.
3. Apakah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam rangka memberdayakan pengawas sekolah sehubungan dengan pelaksanaan kepengawasan untuk penjaminan mutu pendidikan ?
- 4.Bagaimana pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh pengawas sekolah terhadap kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam rangka penjaminan mutu pendidikan di sekolah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian perlu ditentukan terlebih dulu agar memberikan arahan jalannya penelitian dan dapat mengendalikan selama penelitian serta memperjelas sasaran yang dituju. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan , manajemen kepengawasan pendidikan dan standar kompetensi pengawas sekolah, kemudian menganalisis apakah sudah sesuai dengan fungsinya dalam rangka penjaminan mutu pendidikan. Dari hasil deskriptis analisis tersebut dapat

dirumuskan mengenai pentingnya peningkatan kompetensi pengawas sekolah dalam rangka pelaksanaan kegiatan kepengawasan di sekolah . Kegiatan kepengawasan yang harus dilaksanakan oleh pengawas sekolah, dalam rangka penjaminan mutu pendidikan di sekolah.

Secara khusus penelitian ini bertujuan :

1. Untuk memperoleh gambaran objektif kompetensi pengawas sekolah yang sudah dimiliki dan dilaksanakan oleh pengawas sekolah dalam pelaksanaan manajemen kepengawasan pendidikan di Kota Bekasi
2. Memperoleh gambaran objektif tentang kompetensi Pengawas sekolah apa saja yang harus ditingkatkan melalui pemberdayaan Pengawas sekolah, dalam rangka penjaminan mutu pendidikan di sekolah .
3. Memperoleh gambaran faktor- faktor dominant yang menjadi pendukung dan penghambat untuk pemberdayaan pengawas sekolah dalam rangka penjaminan mutu pendidikan di sekolah
4. Mengidentifikasi dan menganalisis kegiatan kepengawasan yang harus dilaksanakan oleh pengawas sekolah, untuk dijadikan model kepengawasan dalam rangka melaksanakan penjaminan mutu pendidikan di sekolah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan sarannya adalah standar kinerja dan kompetensi pengawas sekolah , pelaksanaan kepengawasan yang ada sekarang dan pengembangan kompetensi pengawas sekolah serta pelaksanaan kegiatan kepengawasan dalam rangka penjaminan mutu pendidikan di sekolah

menengah. Kegiatan kepengawasan pendidikan ini dalam hubungannya dengan manajemen mutu terpadu dalam pendidikan , pada era otonomi daerah.

#### 1. Aspek teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam upaya pengembangan ilmu Administrasi Pendidikan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia tenaga kependidikan, dan lebih khusus pengawas sekolah.

#### 2. Aspek praktis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi khususnya dan lembaga terkait dengan kepengawasan umumnya, untuk pengembangan kompetensi pengawas sekolah dalam pelaksanaan kepengawasan pendidikan. Terutama dalam manajemen kepengawasan pendidikan dan pelaksanaan kegiatan kepengawasan yang seharusnya dilaksanakan oleh Pengawas Sekolah dalam rangka penjaminan mutu pendidikan di sekolah.

### **E. Premis Penelitian**

Premis penelitian merupakan landasan berpikir yang menjadi argumentasi berdasarkan esensi konsep keilmuan yang telah dianggap benar, dan tidak perlu lagi pembuktian. “Bersumber kepada hasil penelitian atau kepakarannya. Premis menggunakan konsep keilmuan yang telah diakui kebenarannya, digunakan sebagai pembimbing melakukan penelitian, sejak awal , studi lapangan, alat menganalisis dan landasan menarik kesimpulan . Premis digunakan sebagai alat analisis , untuk memisahkan atau mempersatukan keputusan logis terutama dalam

menarik kesimpulan , mana titik pangkal, mana isu pokok “. ( Nasution ,1988 : 35)

Premis 1 : Agar proses pendidikan berkualitas perlu dilakukan intervensi yang sistematis sehingga memberikan jaminan kualitas yang meyakinkan. Salah satu intervensi sistematis adalah melalui peningkatan supervisi oleh Pengawas Sekolah. Dalam hal ini pembinaan sekolah , khususnya pengendalian mutu kegiatan belajar mengajar, pengawas hendaknya berperan sebagai katalisator ( Hamid Hasan ,2000 : 4 ).

Premis 2 : Pemberdayaan sebagai upaya mendorong dan memungkinkan individu-individu untuk mengemban tanggungjawab pribadi atas upaya mereka memperbaiki cara mereka melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dan menyumbang pada pencapaian tujuan (Clutterbuck : 2003 :3 )

Premis 3 . “Pemberdayaan sumber daya manusia adalah suatu proses kegiatan usaha untuk lebih memberdayakan” daya manusia” melalui perubahan dan pengembangan manusia itu sendiri ,berupa kemampuan,kepercayaan, wewenang dan tanggungjawab dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi untuk meningkatkan kinerja sebagaimana diharapkan”( Sedarmayanti, 2008 : 287 ).

Premis 4. “ *Supervision is a set of activities and role specifications,specifically designed to influence instruction* “ ( Sergiovani and Storrat , 1983 : 13 ).

Premis 5 : *“The purpose of inspection is to identify strengths and weaknesses in schools so that they may improve the quality of education offered and raise the standards achieved by their pupils “(Unit Kingdom For HMSO, 1993 : 4 ).*

Premis 6 : *Sergiovani dan Starrat ( 1993:24 ) :” Supervision is a process designed to help teacher and supervisor learn more about their practice ; to better able to use their knowledge and skills to better serve parents and schools ; and to make the school a more effective learning community*

Premis 7 : Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi , dan sertifikasi( PP No. 19 Tahun 2005 )..

Premis 8 : Supervisi adalah kegiatan berupa bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh supervisor yaitu pengawas dan kepala sekolah kepada guru dan staf tata usaha untuk meningkatkan kinerjanya dalam mencapai tujuan pendidikan bermutu (Suharsimi Arikunto ,2004 :24 ).

Premis 9 : Supervisi pendidikan dipandang sebagai kegiatan yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Dalam konteks profesi pendidikan khususnya profesi mengajar, mutu pembelajaran merupakan refleksi dari kemampuan profesional guru. Supervisi pendidikan berkepentingan dengan upaya peningkatan kemampuan profesional guru, yang pada gilirannya akan berdampak terhadap peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran ( Djam’an Satori 1997 : 3 )

Premis 10 : Pengawas sekolah harus memahami tugasnya dalam membina dan mengembangkan kepala sekolah profesional, terutama berkaitan dengan pengembangan kreatifitas dan pemberian motivasi, karena pengembangan kepala sekolah profesional merupakan program pengawas sekolah yang harus diprioritaskan.(Mulyasa,2004:37 )

Premis 11 : Pengawasan internal sekolah hakikatnya bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja sekolah secara kolektif dan berkesinambungan dengan harapan mampu mengevaluasi dan mengelola urusan dalamnya sendiri. Apabila sekolah memiliki akuntabilitas maka kualitas proses pelayanan pendidikan meningkat dan tumbuhnya kepercayaan masyarakat ( Depdikbud : 1993 ).

#### **F. Paradigma Penelitian**

Penelitian pada hakekatnya merupakan wahana untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran . Paradigma merupakan : Sebagai suatu kesatuan persepsi, gagasan , konsep dan nilai-nilai yang menentukan pola pikir dan berperilaku manusia dalam waktu dan tempat tertentu “ ( Moch. Surja, 1997 : 18 ). Paradigma merupakan dasar pemikiran yang digunakan dalam menyoroti dan mengkaji permasalahan . Dikaitkan dengan kegiatan penelitian , maka paradigma dapat diartikan sebagai kerangka konseptual dalam melihat persoalan secara terstruktur. “ Paragdigma adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama konsep atau proposisi yang mengartikan cara berpikir dalam penelitian ( Bogdan dan Biklen dalam Moleong , 2000 : 30 ).

Paradigma penelitian adalah model yang dijadikan acuan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Paradigma penelitian sebagai kerangka berfikir yang diambil oleh peneliti dalam meneliti atau memahami realitas objek yang diteliti dan disampaikan oleh peneliti dalam bentuk narasi atau gambar.

Penelitian ini mempersoalkan mengenai kompetensi pengawas sekolah apakah dalam pelaksanaan pembinaannya sudah sesuai dengan kriteria dalam rangka penjaminan mutu pendidikan. Kemudian termasuk manajemen kepengawasan pendidikan dalam pengembangan kompetensi dan kemampuan profesionalnya. Bertolak dari pemberdayaan dengan peningkatan kompetensi pengawas itulah diupayakan adanya pengembangan kepengawasan pendidikan di sekolah dalam rangka penjaminan mutu pendidikan.

Analisis kualitatif pertama ditujukan terhadap standar kompetensi pengawas dalam mengembangkan kegiatan kepengawasan yang dilaksanakan oleh pengawas sekolah sekarang ini, kaitannya dengan tugas dan fungsi pengawas sekolah dalam penjaminan mutu pendidikan. Kajian pertama terhadap kompetensi Pengawas Sekolah sesuai dengan jabatan fungsional, meliputi inventarisasi dan identifikasi kompetensi Pengawas Sekolah yang sudah ada dihubungkan dengan penjaminan mutu pendidikan. Kemudian kajian terhadap kualifikasi dan kompetensi Pengawas sekolah antara yang dipersyaratkan menurut peraturan yang ada maupun menurut kajian akademik, dengan kenyataan yang dimiliki para pengawas sekolah secara empirik dalam kondisi faktual. Hal ini disesuaikan dengan tugas utama pengawas sekolah yaitu menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Kajian terhadap kondisi faktual secara empirik di era otonomi daerah ,tentang kedudukan pengawas sekolah ,pelaksanaan pekerjaan pengawas sekolah dan pengembangan karier bagi pengawas sekolah , pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi .

Analisis kedua diarahkan kepada kegiatan untuk mengetahui faktor-faktor dominan dalam pemberdayaan untuk peningkatan kinerja dan kompetensi Pengawas sekolah dalam rangka penjaminan mutu pendidikan. Analisis kedua ini diarahkan pula pada kajian faktor pendukung dan penghambat baik internal maupun eksternal terhadap pengembangan kegiatan kepengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas Sekolah dalam rangka penjaminan mutu pendidikan.

Analisis ketiga dilakukan melalui kajian terhadap peningkatan kompetensi pengawas sekolah dengan memperhitungkan hasil kajian dari faktor- faktor pendukung dan penghambat baik internal maupun eksternal untuk melaksanakan kegiatan kepengawasan pendidikan yang dilaksanakan oleh Pengawas Sekolah dalam penjaminan mutu pendidikan. Tentunya berhubungan dengan kinerja dan kompetensi pengawas sekolah , perencanaan pengawasan , proses pengawasan ,evaluasi dan analisis hasil kepengawasan untuk mewujudkan pengawas yang professional dalam penjaminan mutu pendidikan di Kota Bekasi .

Secara skematis paradigma penelitian dapat digambarkan seperti dalam gambar 1.1 berikut :